

MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

**(Studi Kasus Kegiatan Pemberian Ikan Kerapu Hatchery Sekala
Rumah Tangga / HSRT di Kabupaten Situbondo)**

Ardy Soesanto
Universitas Hang Tuah Surabaya
Ardy_Soesanto@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country that has the potential of marine natural resources is quite large, especially in the field of fisheries. But until now the condition of coastal communities still lagging. Therefore needed coastal zone management strategy right, one is to apply the model of economic empowerment of coastal communities in accordance with the region in natural resources and human resources culture of the society.

The research focus is on the implementation of the model of community empowerment through business activities group HSRT in Situbondo District that implement the principles of good governance. Empowerment model with the principles is that promotes involvement in the implementation of the three pillars, namely the role of government, private and public, application of the empowerment model was considered successful in the empowering the well-being of coastal communities research area.

So that this model can be applied, then we describe the factors supporting and factor constraints and requirements that must be fulfilled. We hope this research can be used as the basis for local governments to adopt policies, as well as for further research.

Keywords : Empowerment model, The principles of Good Governance, The Economic welfare, Coastal Communities.

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negeri kelautan. Namun, masyarakat pesisir masih jauh tertinggal. Jumlah penduduk miskin pesisir cukup besar, yakni mencapai 32,14 persen dari jumlah total penduduk miskin Indonesia (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha KKP), Sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,28 juta (Badan Pusat Statistik 2014), jadi jumlah penduduk miskin di pesisir sebanyak kurang lebih 9,09 juta jiwa, padahal Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar di kawasan pesisir.

Salah satu bagian terpenting dari kondisi geografis Indonesia sebagai wilayah kepulauan adalah wilayah pantai dan pesisir dengan garis pantai sepanjang 81.000 Km (Dahuri *et. al.*, 2002). Wilayah pantai dan pesisir memiliki arti yang strategis karena merupakan wilayah interaksi/peralihan (*interface*) antara

ekosistem darat dan laut yang memiliki sifat dan ciri yang unik, dan mengandung produksi biologi cukup besar serta jasa lingkungan lainnya Dahuri *et. al.*, (1996).

Secara keseluruhan kebijakan ini dapat di laksanakan di berbagai wilayah negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, seperti halnya yang terdapat di wilayah Jawa Timur khususnya Kabupaten Situbondo.

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang letaknya berada di ujung timur Pulau Jawa bagian utara dengan posisi antara $7^{\circ}35'$ - $7^{\circ}44'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}30'$ - $114^{\circ}42'$ Bujur Timur. Daerah fisik Kabupaten Situbondo memanjang dari barat ke timur sepanjang pantai selat Madura, dengan panjang pantai ± 150 km, lebar rata-rata ± 11 km dengan luas daratan $1.638,50$ km 2 atau $163,85$ ha. Kabupaten Situbondo merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 - 1.250 m di atas permukaan air laut dengan kemiringan antara 0 - 45° (Laporan Tahunan Kabupaten Situbondo 2013).

Letak strategis Kabupaten Situbondo dimantapkan dengan posisinya pada jalan arteri primer Surabaya-Banyuwangi dan jalan kolektor sekunder ke arah Bondowoso, menyebabkan arus informasi yang lancar baik ke dalam maupun ke luar wilayah Kabupaten Situbondo dan juga memberikan peluang besar untuk memajukan dan meningkatkan potensi wilayahnya di masa yang akan datang.

Ditinjau dari potensi dan kondisi wilayah, Kabupaten Situbondo dapat dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu: (1) Wilayah utara merupakan pantai dan laut yang sangat potensial untuk pengembangan komoditi perikanan baik budidaya maupun penangkapan ikan, (2) Wilayah tengah bertopografi datar dan mempunyai potensi untuk pertanian, dan (3) Wilayah selatan bertopografi miring mempunyai potensi untuk tanaman perkebunan dan kehutanan.

Potensi perikanan di kabupaten Situbondo meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, sedangkan perikanan budidaya dibagi menjadi menjadi tiga kelompok yaitu budidaya komoditas air tawar, budidaya komoditas air payau dan budidaya komoditas air laut.

Kebijakan pemerintah mulai pusat sampai kabupaten terhadap pengembangan perikanan budidaya merupakan salah satu strategi di dalam peningkatan produksi perikanan. Hal ini di karenakan semakin lama kebutuhan ikan semakin meningkat sedangkan ikan dari hasil tangkapan laut semakin menurun karena berbagai permasalahan yang ada. Faktor utama dalam upaya pengembangan kegiatan budidaya adalah adanya ketersediaan benih ikan. Oleh karena itu pengembangan kegiatan pembenihan ikan / *hatchery* juga harus di kembangkan seiring dengan berkembangnya usaha kegiatan budidayanya.

Kegiatan usaha pembenihan ikan di Kabupaten Situbondo tersebar di beberapa Kecamatan berpantai yaitu Banyuglugur, Besuki, Mlandingan, Bungatan dan Gundil. Usaha pembenihan dikembangkan tidak hanya oleh perusahaan namun juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk sekala rumah tangga atau biasa disebut dengan *Hatchery* Sekala Rumah Tangga. Kegiatan pembenihan sekala rumah tangga yang berkembang di Kabupaten Situbondo dapat menjadi alternatif usaha didalam pengelolaan wilayah pesisir yang mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai model dalam rangka upaya pemerintah memberdayakan masyarakat pesisir.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang manfaat kegiatan pembenihan ikan kerapu terhadap upaya peningkatan sosial ekonomi serta peran dukungan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dengan judul

"Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Kegiatan Pemberian Ikan Kerapu Hatchery Sekala Rumah Tangga / HSRT di Kabupaten Situbondo)."

Maka adapun perumusan masalah adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana model pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pemberian ikan kerapu *hatchery* sekala rumah tangga di Kabupaten Situbondo ? (2) Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan kendala pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pemberian ikan kerapu *hatchery* sekala rumah tangga di Kabupaten Situbondo ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis model pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pemberian ikan kerapu *hatchery* sekala rumah tangga di Kabupaten Situbondo, (2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor pendukung dan kendala pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pemberian ikan kerapu *hatchery* sekala rumah tangga di Kabupaten Situbondo

II. Landasan Teori

Pengertian mengenai kemiskinan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan kronis, dan kemiskinan sementara.

1. Kemiskinan absolut adalah apabila tingkat pendapatan seseorang dibawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum (*basic needs*), antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif adalah apabila seseorang yang mempunyai pendapatan di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan relatif ini erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang sifatnya struktural, yakni kesenjangan akibat kebijaksanaan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat.
3. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh acuan pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.
4. Kemiskinan kronis adalah kemiskinan yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :
 - a. Kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif
 - b. Keterbatasan sumberdaya dan keterisolasi (yaitu daerah-daerah kritis sumberdaya alam dan daerah terpencil)
 - c. Rendahnya taraf pendidikan dan derajat perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar.
5. Kemiskinan sementara adalah kemiskinan yang terjadi akibat adanya : Perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, adanya perubahan yang bersifat musiman serta adanya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat Sumodiningrat (1989) .

Kemiskinan adalah ciri yang sangat menonjol dari kehidupan masyarakat pesisir di Indonesia, khususnya nelayan. Secara umum nelayan lebih miskin dibanding petani. Hal ini terutama disebabkan oleh: (1) Tantangan alam yang dihadapi nelayan sangat berat, termasuk faktor musim; (2) Pola kerja yang homogen dan bergantung hanya pada satu sumber penghasilan; (3) Keterbatasan penguasaan modal dan sarana prasarana; (4) Keadaan pemukiman dan perumahan yang tidak memadai; (5) Karakteristik sosial-ekonomi belum mengarah pada sektor jasa lingkungan seperti kegiatan wisata (Rahardjo, 1999).

Pemberdayaan merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan, Sumodiningrat (1999).

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu di telusuri apa yang sesungguhnya di maknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang di tandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang di pandang tepat demi mencapai pemecahan masalah masalah yang di hadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan *kognitif, konatif, psikomotorik, afektif*, dengan penggerahan sumberdaya yang di miliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Dengan demikian untuk menjadi mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumberdaya manusia yang utuh dengan kondisi *kognitif, konatif psikomotorki, afektif* dan sumberdaya lainnya yang bersifat fisik material.

Perlu dipikirkan siapa yang sesungguhnya menjadi sasaran pemberdayaan. Schumacher memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural lebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan demikian memberikan "kail jauh lebih tepat daripada memberikan ikan". Disamping itu *NGO* merupakan agen yang mendapat posisi penting, karena di pandang lebih bersifat *entrepreneur*, berpengalaman dan *inofatif* di bandingkan pemerintah. Pemeknaan pemberdayaan selanjutnya seiring dengan konsep *good governance*. Konsep ini mengetengahkan ada tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras (Akbar Teguh Sulistiyani, 2004).

Prinsip *good governance*, sebagaimana dikehendaki oleh *world bank*, adalah merupakan konstruksi tata pemerintah yang baik menyangkut suatu konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif serta di dalamnya mengatur pola hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah (*governmet*), dunia swasta (*business*) dan masyarakat (*Community*).

Aspek Kemitraan Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Dalam rangka menciptakan *good governance* di suatu negara hendaknya mampu mendekatkan antara unsur pemerintahan, unsur swasta maupun masyarakat. Pemerintahan hendaknya menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada swasta dan masyarakat, sehingga keduanya dapat mengambil porsi yang tepat dalam

pembengunan. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang tak berdaya (masyarakat miskin), supaya dapat memiliki kekuatan untuk membangun, serta meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk membangun.

Model Kemitraan Dalam Pembangunan. Apa yang di rekomendasikan oleh pola baru di dalam membangun bangsa dan negara adalah dengan model kemitraan. Dengan cara memberikan peran yang setara kepada tiga aktor pembangunan, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintahan dalam hal ini sudah lebih transparan dan mengembangkan kepemimpinan yang partisipatif. Swasta hendaknya mampu memberikan kontribusi dalam memberikan energi untuk melaksanakan pemberdayaan bersama pemerintah dan masyarakat. Masyarakat hendaknya mampu memanfaatkan peluang untuk memberikan peran aktif melalui partisipasi yang *koheren*.

Peran Tiga Pilar/Aktor Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin perlu dirancang kontribusi masing-masing aktor yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga terbentuk model kemitraan yang di harapkan. Rancangan peran ketiga aktor tersebut tampak pada tabel berikut :

Tabel 1 Peran Tiga Aktor / Pilar dalam Pemberdayaan Masyarakat

Aktor	Peran dalam pemberdayaan	Bentuk Output Peran	Fasilitasi
Pemerintah	Formulasi dan penetapan policy, implementasi, monitoring dan evaluasi mediasi	Kebijakan: politik, umum, khusus / departemental / sektoral penganggaran, juknis dan juklak, penetapan indikator keberhasilan, peraturan hukum, penyelesaian sengketa.	Dana, jaminan, alat, teknologi, network, sistem managemant informasi, edukasi
Swasta	Kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi	Konsultasi dan rekomendasi kebijakan, tindakan dan langkah / policy action implementasi, donatur, private investment pemeliharaan	Dana, alat, teknologi, tenaga ahli dan sangat terampil.
Mayarakat	Partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi	Saran, input, kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan dalam formulasi kebijakan. policy action, dana swadaya menjadi obyek, partisipan, pelaku utama / subyek menghidupkan fungsi sosial kontrol	Tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik dan setengah terlatih.

Sumber : Akbar Tegus Sulistiyani, 2004

Berdasarkan pemetaan peran tiga aktor dalam tabel diatas, pemerintah lebih banyak berperan pada penentuan rambu-rambu dan aturan main secara umum. Peran pemerintah yang paling menonjol sesungguhnya terletak pada peran pengambilan keputusan dan pendanaan. Selain itu peran mediasi dan kontrol juga sangat penting untuk menghindari penyimpangan.

Untuk menjaga kualitas hasil pemerintah sebaiknya juga menetapkan pola *monitoring* dan *evaluasi* yang jelas, dan berkelanjutan. Dalam rangka memudahkan pemeliharaan hasil hasil pembangunan, menjaga kualitas dan tanggung jawab bermitra hendaknya pemerintah menyusun dan menetapkan kriteria evaluasi, pada setiap program pembangunan. Kriteria yang dibangun tersebut di konsultasikan, didiskusikan dengan pihak, masyarakat “ yang memiliki kompetensi / profesi relevan”.

Swasta mengambil peran lebih banyak pada implementasi penentuan langkah / *policy avtion* bersama masyarakat. Peran demikian perlu di tekankan, supaya terjadi variasi analisis berdasarkan kondisi khusus dan bersifat kasuistik di tingkat daerah. Dengan dikian pemberdayaan yang di lakukan akan lebih mendekati kebutuhan lokal. Peran swasta dalam implementasi kebijakan pemberdayaan juga mencakup kontribusi dana melalui investasi swasta yang bermanfaat untuk mendukung proses perberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Berbasis Masyarakat atau biasa disebut *Community Based Management* (CBM) menurut Nikijulw (1994) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam, misalnya perikanan, yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya.

Pengelolaan Berbasis Masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumber daya alam di suatu tempat dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Strategi pengembangan masyarakat pesisir dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang bersifat struktural dan non struktural. Pendekatan struktural adalah pendekatan makro yang menekankan pada penataan sistem dan struktur sosial politik. Pendekatan ini mengutamakan peranan instansi yang berwewenang atau organisasi yang dibentuk untuk pengelolaan pesisir laut. Dalam hal ini peranan masyarakat sangat penting tetapiakan kurang kuat karena aspek struktural biasanya lebih efektif bila dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, paling tidak pada tahap awal.

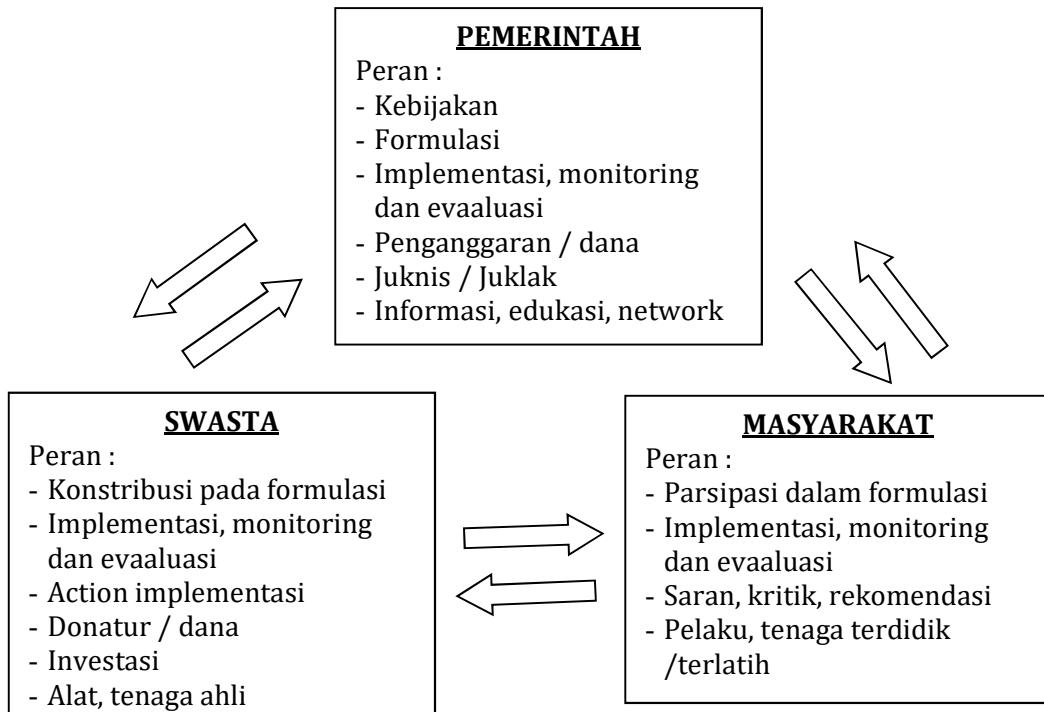
Dalam Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang perikanan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran yang dilaksanakan.

Adapun peran pemerintah yang dapat di berikan adalah berupa di keluarkannaya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi pengembangan wilayah pesisir sehingga memberikan ruang khusus bagi daerah yang mempunyai potensi untuk di kembangkannya kegiatan pemberian ikan kerapu skala rumah tangga. Sedangkan bagi dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan dapat mengeluarkan suatu kebijakan bagi pengembangan kawasan tertentu (daerah pesisir pantai) untuk dikembangkannya kegiatan usaha pemberian ikan kerapu skala rumah tangga. Peran Lembaga penelitian milik pemerintah (BBAP Situbondo) yang merupakan UPT kementerian berperan sebagai penyedia sarana utama serta teknologi. Sedangkan peran UBBL

Situbondo yang merupakan UPT Provinsi Jawa Timur juga sangat penting dalam hal ini selain penyediaan sarana, pembinaan di lapangan serta penyelenggaraan alih teknologi melalui pelatihan.

Peran masyarakat dalam bentuk partisipasi aktif masyarakat sangat di perlukan, di harapkan masyarakat memahami potensi yang ada di wilayahnya dengan cara membekali diri dengan pendidikan dan keterampilan sehingga mampu mengelola potensi yang ada. Peran swasta juga tidak kalah pentingnya, berupa investasi atau permodalan baik dalam bentuk *private investment* ataupun dalam bentuk kerjasama, demi terwujudnya kegiatan usaha. Sehingga seluruh stakeholder harus bekerjasama / bersinergi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dari uraian di atas, dapat kami risngkas berupa skema alur pemikiran dalam penelitian ini :

**Alur Pemikiran Penelitian
Tiga Pilar *Good Governance* Dalam Pemberdayaan Masyarakat**



Gambar 1

World Bank dalam Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, Budi Rianto, 2013.

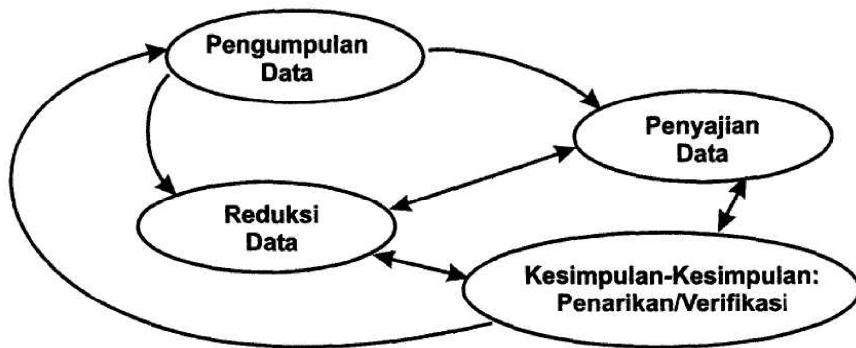
III. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, berupa pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari obyek penelitian, dalam arti obyek yang dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini berusaha untuk memperoleh gambaran tentang kegiatan usaha pemberian ikan kerupu skala rumah tangga di Kabupaten Situbondo sebagai alternatif dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya melalui model tiga pilar pada prinsip-prinsip *good governance* yaitu peran seluruh stakeholder Pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dalam penelitian ini penetapan fokus penelitian adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kegiatan pemberian ikan kerapu HSRT dengan pendekatan model peran tiga aktor dalam prinsip-prinsip *good governance*. Peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, BBAP Situbondo (UPT Kementerian) dan UPBL Situbondo (UPT Provinsi), peran Swasta dan partisipasi masyarakat di dalam pengembangan kegiatan usaha pemberian ikan kerapu skala rumah tangga di kabupaten Situbondo. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah hal-hal sebagai berikut : (1) Peran Pemerintah, (2) Peran Swasta , (3) Partisipasi Masyarakat, (4) Penerapan model pemberdayaan *good governance*.

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Kabupaten Situbondo khususnya di Kecamatan Bungatan. Pemilihan lokasi ini pilih dengan pertimbangan sebagai berikut : (1) Kabupaten Situbondo sebagai salah satu daerah dengan produksi benih kerapu terbesar di Indonesia; (2) Kabupaten Situbondo melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berhasil membuat suatu kawasan pengembangan usaha pemberian skala rumah tangga; (3) Kegiatan usaha pemberian skala rumah tangga di wilayah lokasi penelitian memberikan dampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakatnya. Lokasi penelitian tersebut mudah dijangkau, sesuai dengan kemampuan tenaga yang dimiliki, dan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan menggunakan *interactive model of analysis* (analisis model interaktif) yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermann. Pada model interaktif ini peneliti bergerak pada tiga komponen, yaitu reduksi data (*data reduction*), *data display*, dan *conclusion drawing* yaitu terdiri dari tahap penarikan dan verifikasi (Miles dan Hubermann, 1992). Model ini menganjurkan peneliti untuk tetap selalu mempertimbangkan tiga komponen analisis dengan kegiatan pengumpulan data, selama proses pengumpulan data berlangsung dan sesudah pengumpulan data selesai dengan menggunakan waktu yang ada bagi penelitian ini. Proses analisis interaktif ini dapat disajikan dalam bentuk gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Analisis Data
Sumber: Miles dan Hubermann (1992)

IV. Hasil dan Pembahasan

Kelurahan Marunda merupakan hasil penggabungan sebagian wilayah Jawa Barat ke wilayah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI

Jakarta Nomor 1251 Tahun 1996 tentang Pemecahan, Penetapan Batas, Perubahan Nama Kelurahan yang Kembar, Penetapan Luas Wilayah Kelurahan-Kelurahan di DKI Jakarta. Luas wilayah Kelurahan Marunda 791,69 Ha. Dari luas wilayah tersebut 50 % merupakan pemukiman penduduk, sedangkan 50 % lainnya berupa empang, industry/pergudangan, dan garasi truk trailer.

Mata Pencaharian penduduk Kecamatan Bungatan, dalam bekerja terserap mayoritas pada sektor pertanian dalam ari luas (pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan) yang menyerap tenaga kerja sebesar 80,44%, hal ini membuktikan bahwa sektor ini menjadi penyangga perekonomian masyarakat di Kecamatan Bungatan.

Peringkat kedua adalah sector-sektor jasa dan perdagangan yang menyerap tenaga kerja sebesar 10,90 % yang merupakan sektor kerja perorangan. Sedangkan di peringkat ketiga adalah sector industry yang mampu menyerap 8,65%.

Dari seluruh potensi usaha yang ada di Kabupaten Situbondo, yang di bahas di sini adalah potensi yang berhubungan dengan usaha pembenihan ikan. Berdasarkan data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan di ketahui bahwa Jumlah produksi untuk usaha pembenihan air laut / payau (Hatchery Sekala Rumah Tangga) HSRT pada tahun 2013 mengalami peningkatan produksi sebesar 124.982.500 ekor atau sekitar 85,75% yaitu 145.760.000 ekor pada tahun 2012 menjadi 270.742.500 ekor pada tahun 2013.

Jumlah produksi pembenihan air laut / payau (Hatchery Sekala Rumah Tangga) HSRT untuk tiap komoditas yang memang banyak di kembangkan di Kabupaten Situbondo, namun pada tahun 2013 tidak semua komoditas tercatat jumlah produksinya. Komoditas tersebut adalah udang windu, udang vaname, ikan kerapu tikus, ikan kerapu cantang, ikan kerapu macan dan ikan bandeng. Produksi pada tiap triwulan secara lengkap dapat di lihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1. Jumlah Produksi HSRT Tiap Triwulan Tahun 2013

NO	KOMODITAS	PRODUKSI (Ekor)				Total
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan VI	
1	Udang Windu	16.000	3.000	500	0	19.500
2	Udang Vaname	232.000	4.000	2.000	1.506	239.506
3	Ikan Krp Tikus	0	0	0	700	700
4	Ikan Krp Cantang	7.150	1.185	1.500	1.201,5	11.036,5
		255.150	8.185	4.000	3.407,5	270.7425

Sumber : Statistik Kelautan dan Perikanan, 2014

Dari tabel produksi benih di Kabupaten Situbondo bahwa pada tahun 2013, produksi benih ikan kerapu cantang sebesar 11.036.500 ekor. Produksi tertinggi terjadi pada triwulan I, yaitu pada bulan januari – maret, hal ini di karenakan cuaca pada bulan bulan tersebut sangat mendukung dalam kegiatan pembenihan ikan kerapu.

Kegiatan pembenihan ikan kerapu sangat di pengaruhi oleh cuaca. Kondisi cuaca berpengaruh pada suhu dan curah hujan. Suhu optimal untuk pembenihan adalah 30 – 31 derajat celsius. Sedangkan curah hujan, selain dapat mempengaruhi suhu juga mempengaruhi pertumbuhan *plankton*.

Tabel 2. Jumlah Peningkatan Produksi HSRT Tahun 2012 -2013

No	Jenis Komoditas	Produksi (ekor)		Naik / Turun (%)
		Tahun 2012	Tahun 2013	
1	Udang Windu	31.000.000	19.500.000	- 31,09
2	Udang Vaname	111.900.000	239.506.000	114,04
3	Ikan Krp Tikus	120.000	700.000	483,33
4	Ikan Krp Cantang	2.740.000	11.36.500	302,79
	JUMLAH	145.760.000	270.742.500	85,75

Sumber : Statistik Kelautan dan Perikanan, 2014

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa peningkatan produksi benih kerapu baik tikus maupun kerapu cantang mengalami peningkatan produksi yang sangat signifikan, di bandingkan dengan produksi benih udang, terutama udang windu yang mengalami penurunan yang sangat tajam. Walaupun dari segi jumlah, produksi benih udang masih lebih besar. Namun jumlah produksi benih ikan kerapu dengan jumlah produksi benih ikan kerapu tidak dapat di perbandingkan, akan tetapi di perkembangannya jelas terlihat bahwa produksi benih ikan mengalami trenkenaikan yang sangat pesat.

Peran Tiga Pilar/Aktor Dalam Pemberian Ikan *Hatchery* (HSRT). Model pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan prinsip *good governance* adalah mengutamakan keterlibatan tiga pilar / aktor didalam implementasinya yaitu peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk itu kami mencoba mendeskripsikan peran seluruh pilar / aktor tersebut diwilayah objek penelitian.

Peran pemerintah didalam pelaksanaan pengembangan kegiatan pemberian ikan kerapu sekala rumah tangga di kabupaten Situbondo mempunyai peran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Situbondo :
 - a. Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, sehingga dinas tersebut dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
 - b. Penentuan RTRW bagi kawasan usaha perikanan
 - c. Pemberian paket bantuan / hibah
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo
 - a. Rekomendasi penerbitan SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) atau SKT (Surat Keterangan Tercatat untuk usaha kecil.
 - b. Pembentukan kawasan perikanan terpadu Minapolitan
 - c. Zonasi kawasan usaha perikanan
 - d. Pembinaan melalui pembentukan kelompok kelompok pemberian / budidaya
 - e. Menyalurkan paket hibah dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
 - f. Penerbitan SKA (surat keterangan asal) benih

Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo Bapak Kholil SP, Mpi, mengenai peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo pada tanggal 10 Agustus 2015, mengatakan :

"Pemerintah Kabupaten Situbondo memberikan dukungan yang cukup besar dalam upaya pengembangan perikanan di Kabupaten Situbondo, baik usaha penangkapan maupun budidaya. Peran tersebut tertuang dalam

tugas pokok dan fungsi Dinas. Khusus pada kegiatan budidaya perikanan, melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya pengembangan usaha perikanan baik di budidaya maupun pembernihannya melalui pembentukan zonasi usaha perikanan yang tersebar di beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Bungatan untuk kawasan pembernihian. Selain itu juga di bentuk sebuah kawasan perikanan terpadu minapolitan dimana di kawasan tersebut terdapat beberapa usaha perikanan yang saling mendukung. Adapun tugas lainnya adalah memberikan pelayanan terhadap para pembudidaya melalui pemberian rekomendasi untuk pengurusan SIUP untuk perusahaan, SKT untuk pembudidaya sekala kecil, penerbitan SKA kami lakukan karena pihak karantina masih belum melakukannya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan kelembagaan melalui pembentukan kelompok-kelompok pembudidaya maupun pembernihian, karena salah satu syarat penyaluran bantuan / hibah adalah kepada kelompok-kelompok tersebut." (Hasil wawancara Agustus, 2015)

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Budidaya Air Payau (BBAP Situbondo)
 - a. Hasil teknologi melalui BBAP sebagai balai penelitian
 - b. Laboratorium uji untuk melayani pembernih dalam hal kesehatan ikan
 - c. Penerbitan SHU (Surat hasil Uji Laboratorium) berupa uji PCR sebagai persyaratan distribusi benih ikan lintas provinsi.
 - d. Penyedia sarana produksi kegiatan pembernihian (telur ikan kerapu dll)
 - e. Pembinaan melalui tenaga penyuluh
 - f. Juklak / Juknis Pembernihian

Kepala Balai Budidaya Air Payau (BBAP Situbondo) Bapak Ir. Dwi Suharmanto, MM mengenai peran BBAP Situbondo pada tanggal 11 Agustus 2015, mengatakan :

"Ikan kerapu merupakan salah satu komoditas perikanan, khususnya ikan laut yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, oleh karena itu perdagangan atau pengusaahan komoditas ini sangat marak. Sebelum budidaya kerapu dilakukan oleh masyarakat yang didalam pemenuhannya hanya mengandalkan dari alam, kegiatan ini selain dapat berdampak negatif terhadap ekosistem juga dalam keberlanjutan usaha akan menyulitkan karena keterbatasan stock. Oleh karena itu pemerintah mengantisipasinya dengan mendorong nelayan/pembudidaya untuk melakukan usaha budidaya kerapu. Salah satu input produksi kegiatan tersebut adalah kebutuhan benih ikan kerapu untuk dibudidayakan. BBAP melaksanakan tugas dalam upaya pengembangan teknologi pembernihian untuk mendukung kegiatan tersebut. Saat ini telah dikembangkan teknologi pembernihian untuk beberapa jenis ikan kerapu, diantaranya ikan kerapu cantang, ikan kerapu tikus, cantik, macan, lumpur dll. Untuk mendukung kegiatan tersebut, di BBAP juga dikembangkan laboratorium uji penyakit yang keberadaannya untuk memudahkan pera pembudidaya dalam memantau permasalahan penyakit dan uji PCR (bebas penyakit tertentu) untuk persyaratan distribusi benih. kami juga menjaga ketersediaan telur kerapu untuk pembernihian di segmen dua agar pembernih khususnya HSRT dapat melaksanakan kegiatan pembernih dengan baik. Namun seiring

- dengan terus berkembangnya unit HSRT saat ini kami harus terus meningkatkan produksi telur, dengan demikian diharapkan kegiatan pembeihan berjalan lancar sehingga mencukupi kebutuhan benih ikan kerapu untuk kegiatan budidaya ". (Hasil wawancara Agustus, 2015)
4. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Budidaya Laut (UPT PBL Situbondo)
 - a. Kaji terap teknologi (mengkaji dan menerapkan hasil penelitian sebelum di sebarluaskan ke masyarakat).
 - b. Penyebarluasan informasi teknologi kegiatan temu teknis
 - c. Peningkatan SDM melalui pelatihan
 - d. Mendukung sebagai penyedia sarana produksi kegiatan pemberian seperti telur kerapu.
 - e. Pembinaan kelompok
 - f. Juklak / Juknis pemberian

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Budidaya Laut (UPT PBL Situbondo) Ibu Ir. Endah Kristiani, MT mengenai peran UPT PBL Situbondo pada tanggal 14 Agustus 2015, mengatakan :

"UPT PBL Situbondo adalah salah satu unit pelaksana teknis milik Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, yang tupoksinya adalah melaksanakan kegiatan pengembangan budidaya laut. UPT merupakan etalase sekaligus ujung tombak dari dinas dalam melaksanakan tugas tugas pelayanan teknis. Adapun diantara tugas tugasnya adalah melaksanakan kaji terap teknologi budidaya perikanan, melaksanakan alih teknologi melalui kegiatan pelatihan, temu teknis dll. Kaji terap teknologi dimaksudkan untuk melakukan kajian teknis terhadap hasil temuan teknologi agar dapat di aplikasikan oleh pembudidaya. Oleh karena itu UPT PBL juga melaksanakan kegiatan kegiatan teknis mulai dari kegiatan pemberian sampai budidaya, agar kegiatan tersebut dapat di jadikan contoh oleh masyarakat, selain itu juga dapat di jadikan sebagai tempat magang baik pembudidaya, pelajar, mahasiswa atau pihak lainnya. Khusu untuk kerapu, UPT PBL melaksanakan kegiatan di seluruh segmennya, mulai segmen 1 yaitu pemeliharaan induk, segmen 2 pemberian, segmen 3 penggelondongan sampai segmen 4 yaitu budidaya di KJA, semua dilakukan dalam rangka membantu masyarakat, khususnya pembudidaya ikan." (Hasil wawancara Agustus, 2015).

Peran Swasta / Pengusaha. Adapun peran swasta dalam proses pemberdayaan masyarakat pesesir melalui kegiatan pembeihan ikan kerapu HSRT di Kabupaten Situbondo adalah :

1. Sebagai pemodal / investor
Pemodal / investor sebagian besar adalah masyarakat lokal, meskipun juga ada yang berasal dari situbondo. Jumlah unit usaha kurang lebih 90 unit.
2. Investasi
Nilai investasi setiap unit pemberian antara Rp, 250.000.000 – 700.000.000 tergantung besar kecilnya unit usaha
3. Penyerapan tenaga kerja
Pada setiap unit usaha dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 4 – 7 orang tergantung besar kecilnya unit usaha

4. Pendukung kebijakan pemerintah
Mendukung pemerintah khususnya dalam upaya pengembangan kawasan budidaya perikanan, peningkatan SDM dan pelestarian SDA.
5. Fasilitasi program pemerintah
6. Penyediaan sarana produksi dan pendukung
Penyediaan jasa transportasi, penjualan sarana produksi (pakan, obat-obatan, peralatan pemeliharaan, peralatan packing dll)
7. Pembeli hasil produksi
8. BANK untuk transaksi keuangan

Dengan demikian, bukan berarti kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha pembenihan ikan kerapu HSRT tidak mempunyai kendala atau hambatan, terdapat beberapa kendala yang menghambat berkembangnya usaha pembenihan ikan kerapu HSRT yaitu :

1. Keterbatasan lahan, seiring dengan terus berkembangnya unit usaha baru, maka lahan yang akan digunakan untuk kegiatan pembenihan akan berkurang.
2. Kebutuhan input sarana produksi, terutama ketersediaan telur ikan kerapu terbatas, sedangkan kebutuhannya terus meningkat, saat ini memenuhinya hanya berasal dari pemerintah (BBAP Situbondo dan UPT PBL Situbondo) dan dari Bali.
3. gagalan panen akibat serangan penyakit pada masa pemeliharaan
4. Survival Rate (SR) yang masih rendah berkisar antara 7- 10 % dari jumlah telur yang di tebar, meskipun pada kasus kasus tertentu pada beberapa hatchery ada yang mencapai SR sampai 30 % bahkan 40%.
5. Di pengaruhi kondisi alam
Kondisi alam / cuaca, sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan usaha pembenihan HSRT. Adapun kondisi alam yang mempengaruhi di antaranya adalah musim hujan / kemarau, suhu, gelombang dan air laut.
6. Sebagian besar kebutuhan pakan untuk benih masih import (80%), dengan harga yang sangat mahal.

V. Kesimpulan

Berdasarkan data-data dan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi pelaksanaan model pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan usaha pembenihan ikan kerapu *hatchery* skala rumah tangga di Kabupaten Situbondo telah menerapkan prinsip prinsip *good governance*. Dimana dalam prinsip *good governance* mengutamakan keterlibatan tiga pilar/aktor didalam implementasinya yaitu peran pemerintah, swasta dan masyarakat.

Penerapan prinsip *good governance* dapat di lihat dari peran tiga pilar/aktor yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat yang saling mendukung sehingga kegiatan usaha pembenihan ikan kerapu di Situbondo dapat berjalan baik, sehingga memberikan dampak perbaikan ekonomi masyarakatnya, khususnya di Kecamatan Bungatan yang merupakan lokasi fokus penelitian.

Keberhasilan kegiatan pemberdayaan dapat dilihat berdasarkan data-data maupun fakta di lapangan yang menunjukkan perekonomian masyarakat cukup baik, idikasinya dari terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat serta investasi di dalam kegiatan usaha pembenihan ikan kerapu yang terus berkembang, yang ditandai dengan terus dibangunnya unit usaha baru.

Faktor pendukung keberhasilan model pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan usaha pemberian ikan kerapu *hatchery* skala rumah tangga di Kabupaten Situbondo, juga merupakan hasil sinergi yang kuat dari seluruh aktor yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan saling mendukung.

Namun demikian, bukan berarti kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha pemberian ikan kerapu HSRT tidak mempunyai kendala atau hambatan, terdapat beberapa kendala yang menghambat berkembangnya usaha pemberian ikan kerapu HSRT yaitu :

1. Keterbatasan lahan, seiring dengan terus berkembangnya unit usaha baru, maka lahan yang akan digunakan untuk kegiatan pemberian akan semakin berkurang.
2. Kebutuhan input sarana produksi, terutama ketersediaan telur ikan kerapu terbatas, sedangkan kebutuhannya terus meningkat, perlu diketahui bahwa ikan kerapu bertelur hanya satu bulan sekali, saat ini pemenuhannya hanya berasal dari pemerintah (BBAP Situbondo dan UPT PBL Situbondo) dan dari Bali.
3. Kegagalan panen akibat serangan penyakit pada masa pemeliharaan
4. Survival Rate (SR) yang masih rendah berkisar antara 7- 10 % dari jumlah telur yang di tebar, meskipun pada kasus kasus tertentu pada beberapa hatchery ada yang mencapai SR sampai 30 % bahkan 40%.
5. Di pengaruhi kondisi alam
6. Kondisi alam / cuaca, sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan usaha pemberian HSRT. Adapun kondisi alam yang mempengaruhi di antaranya adalah musim hujan / kemarau, suhu, gelombang dan air laut.
7. Sebagian besar kebutuhan pakan untuk benih masih import (80%), dengan harga yang sangat mahal.

Beberapa hambatan diatas merupakan pekerjaan rumah bagi seluruh aktor yang terlibat untuk dapat mencari solusi bersama. Untuk itu kami perlu memberikan saran atas permasalahan yang ada

VI. Saran

Dari hasil pembahasan disampaikan bahwa dalam implementasi model pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan usaha pemberian ikan kerapu *hatchery* skala rumah tangga di Kabupaten Situbondo, selain adanya faktor pendukung juga terdapat faktor-faktor kendala / hambatan.

Untuk itu Sebagai bahan pertimbangan dalam tindak lanjut penelitian ini, maka dirumuskan sejumlah saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu adanya kajian baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Situbondo untuk menentukan lokasi pengembangan yang baru, dengan mencari lokasi yang mempunyai karakteristik hampir sama dengan Kecamatan Bungatan. Atau dengan mengarahkan calon investor untuk berinvestasi di kecamatan yang lain. Agar permasalahan terhadap semakin sulitnya mendapatkan lahan untuk pembangunan HSRT baru di Kecamatan Bungatan.
2. Seiring dengan semakin berkembangnya usaha pemberian ikan kerapu HSRT di Kabupaten Situbondo, maka kebutuhan akan telur ikan kerapu semakin meningkat. Sedangkan ikan kerapu hanya bertelur satu bulan sekali, kondisi tersebut menjadi kendala tersendiri dalam upaya

pengembangannya. Selama ini kebutuhan telur kerapu hanya di penuhi dari BBAP Situbondo dan UPT PBL Situbondo, sebagian dari pihak swasta di Bali. Namun itu masih belum mencukupi kebutuhan telur, seringkali unit HSRT di Situbondo tidak kebagian telur sehingga tidak dapat operasional, untuk itu disarankan kepada :

- a. Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui dinas terkait untuk menarik investor guna mengembangkan usaha pada segmen 1 yaitu usaha pemeliharaan induk kerapu penghasil telur.
- b. Kepada BBAP Situbondo dan UPBAT Situbondo, agar memperbesar unit pemeliharaan induk yang sudah ada dengan menghitung kebutuhan telur dari seluruh unit HSRT yang ada.
3. Permasalahan terhadap masih adanya serangan penyakit terhadap benih ikan kerapu, agar lembaga-lembaga penelitian, universitas dan balai-balai yang ada, terus melakukan penelitian yang lebih intensif terhadap upaya penanggulangan serangan penyakit pada benih ikan kerapu.
4. Untuk permasalahan masih rendahnya SR (survival rate) pada kegiatan pemberian, semua aktor diharapkan bekerjasama dalam memecahkan permasalahan. Pemerintah melalui Balai dan UPT terus melakukan kajian teknologi, masyarakat dalam hal ini para pekerja di pemberian agar terus meningkatkan keterampilan mereka untuk selalu memperbaiki teknis pemberian sesuai dengan saran teknis dari hasil penelitian dan kaji terap. Sedangkan pihak pengusaha mendukung dengan menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan dan anggaran. Untuk itu diharapkan agar semua unit HSRT mengajukan untuk proses sertifikasi CPIB (Cara Pemberian Ikan yang Baik).
5. Setiap pelaku usaha baik pekerja maupun pengusaha agar mampu mengantisipasi setiap pergantian musim dengan menggunakan peralatan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.

Agar pemerintah mendorong pihak swasta untuk berinvestasi didalam produksi pakan untuk benih ikan kerapu yang berkualitas baik.

Daftar Referensi

- _____. 1996. *Kebijaksanaan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan*. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang.
- _____. 1997. *Kemiskinan*. Balai Pustaka, Jakarta.
- _____. 1999. *Reformasi Pelayanan Publik: Kajian dan Perspektif Teori Governance*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang tanggal 30 Oktober 1999.
- _____. (eds). 2007. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Lkis. Yogyakarta.
- _____. 1993. (Cetakan Kedua). *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi*. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Abidinsyah, 2003. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Masyarakat Pesisir Di Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur*. Tesis. Universitas Brawijaya, Malang.
- Agus Abdurrahman, Saru Arifin, D.Agus Harjito. 2008 *Model Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Bantul Ditinjau dari Perspektif Ekonomi dan Hukum*.
- Basri, Hasan 2003, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.
- BPS Statistik Kabupaten Situbondo. 2014. *Bungatan Dalam Angka*

- Budi Rianto, 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Langkah Strategis Makmur Bersama Rakyat Dengan Cara Yang Bermartabat)*.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Dewanta, Setya Awan, et. all (Eds). 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan Di Indonesia*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Didik Trisbiantoro, Sri Oetami Madyowati, dan Ninis Trisyani, 2013. *Model Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Pesisir Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek*
- H. Mardjoeki 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Utara Daerah Kabupaten Cirebon*
- Islamy, Irfan. 1998. *Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. 1 Agustus 1998.
- Ivan Razali 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Laut*.
- J. Lexy, Moleong. 1989. *Methodology Penelitian Kualitatif*. (Bandung : CV Remadja Karya Cetakan I)
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Kusnadi, 2002. *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber daya Perikanan*. LKIS. Yogyakarta.
- M.Dwi Putro Tiyastono 2011. *Pola Kemitraan Budidaya Perikanan Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Waduk Jatiluhur Kabupaten Purwakarta*.
- Marviandi, Eripto. 2006. Tesis. *Strategi Bertahan Hidup Dan Adaptasi Nelayan Tradisional Desa Koja Doi Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Miles, Matthew and Huberman, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Moleong, J. 2006. (Edisi Revisi). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Pambudi, Himawan S, et al. 2003. *Politik Pemberdayaan: Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*, LAPPERA PUSTAKA UTAMA. Yogyakarta.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2011. *Pedoman Umum (Pedum) Program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (Jalin Kesra) Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin Provinsi Jawa Timur*.
- Schuftan, Claudio. 1996. *The Community Development Dilemma: When Are Service Delivery, Capacity Building, Advocacy And Social Mobilisation Really Empowering?* Community Development Journal. Vol. 31 (3). July 1996.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alpha Beta. Bandung.
- Suhartini Rr, et. al, (eds). 2005. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pesantren. Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. PT. Refika Aditama. Jakarta.
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta. Bandung.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Gaya Media*. Yogyakarta.

- Suyanto, Bagong (eds). 1996. *Perangkap Kemiskinan, Problem Dan Strategi Pengentasannya*. Airlangga dan University Press, Surabaya.
- Tim Pemberdayaan Masyarakat Pesisir PSKP Jember. 2006. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. LKiS. Yogyakarta.
- Wahab, Solihin Abdul. 2002. *Masa Depan Otonomi Daerah: Kajian Sosial, Ekonomi, Dan Publik untuk Menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah*. SIC.